

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELUARAN PUBLIK DALAM STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA  
BUKITTINGGI**

**TESIS**

**OLEH:**

**NABILLA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2220841002**



**DOSEN PEMBIMBING : 1. Dr. Roni Ekha Putera, M.PA**

**2. Dr. Hendri Koeswara, M.Soc,sc**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELUARAN PUBLIK DALAM STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA  
BUKITTINGGI**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik*

*Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

**Nabilla. NIM 2220841002. Analisis Manajemen Pengeluaran Publik Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kota Bukittinggi. Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 2023. Dibimbing Oleh Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA dan Dr. Hendri Koeswara, M.Soc, Sc. Tesis ini terdiri dari 228 halaman dengan referensi 11 buku teori, 3 buku metode, 10 jurnal, 3 Tesis, 6 dokumen dan 15 website.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen tahapan pengeluaran publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pemenuhan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada Tahun Anggaran 2022. Dengan anggaran sebesar 181 Miliar lebih, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan penganggaran kegiatan sebesar 80% untuk pelayanan dasar dan 20% untuk pencapaian mutu pelayanan dasar, pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal. Pada Tahun 2022 ini pemerintah kota bersinergi untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan pasca keadaan akibat Covid-19 dengan peluncuran sejumlah program baru dalam Program Unggulan Pemerintah Bukittinggi (PUPB). Penelitian ini kemudian menganalisa tahapan manajemen pengeluaran publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi berlandaskan pemikiran oleh Cheryl Williamson Gray, dengan menjelaskan kepada beberapa tahapan pelaksanaan, berupa Pertama *Review Policy*, kemudian *Set Policy and Undertake Planning Activity, Mobilize and Allocate Resource, Implement Planned Activities, Monitor and Account*), dan terakhir *Evaluate and Audit*. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menitikberatkan kepada *fenomenology*, dengan berdasarkan data utama observasi, wawancara dan data dokumen lainnya sebagai data sekunder pendukung.

Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi pencapaian target kinerja pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal di angka 97% dengan 3% kekurangannya sebagian besar berada pada kategori pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum seluruhnya berkualifikasi S1/D-IV pada masing-masing tingkat pendidikan. Selain itu pada Tahun 2022 ini dari segi anggaran dirasakan kekurangan akibat pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan PUPB tersebut. Peneliti menyimpulkan dengan menggunakan landasan pemikiran ini memudahkan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi untuk melakukan manajemen secara keseluruhan dari tahapan awal perumusan hingga akhir evaluasi kinerja dalam *planning, organizing, actuacting, controlling* dan *evaluate audit*-nya sehingga penganggaran untuk belanja dapat dibelanjakan hingga ke rupiah terakhir dengan benar. Namun demikian, pemikiran ini belum dapat menjelaskan lebih lanjut dalam perbedaan kewenangan antar tingkatan pemerintah untuk menjalankan program kegiatan, ataupun bagaimana pelaksanaan alokasi penganggaran program yang memiliki sumber dana yang berbeda terutama pada pertengahan pelaksanaan tahun anggaran.

**Kata Kunci** : Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan, Kota Bukittinggi

## **ABSTRACT.**

***Nabilla. NIM 2220841002. Analysis of Public Expenditure Management in Minimum Service Standards in the Education Sector in Bukittinggi City. Study Program Master of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. 2023. Supervised by Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA and Dr. Hendri Koeswara, M.Soc, Sc. This thesis consists of 228 pages with references to 11 theory books, 3 method books, 10 journals, 3 theses, 6 documents and 15 websites.***

*This study aims to analyze the management of public expenditure stages carried out by the Government of Bukittinggi City in fulfilling services and improving the quality of basic services for Minimum Service Standards (SPM) in the field of education in the 2022 Fiscal Year. With a budget of more than 181 billion, the Government of Bukittinggi City allocates activity budgeting 80% for basic services and 20% for achieving quality basic services, in Early Childhood Education, Basic Education and Equality/Non-Formal Education. In 2022 the city government is synergizing to further improve the quality of education after the Covid-19 situation by launching a number of new programs in the Bukittinggi Government Featured Program (PUPB). This study then analyzes the stages of public expenditure management carried out by the Government of Bukittinggi City based on the thoughts of Cheryl Williamson Gray, by explaining the several stages of implementation, in the form of First Review Policy, then Set Policy and Undertake Planning Activity, Mobilize and Allocate Resources, Implement Planned Activities, Monitor and Account), and lastly Evaluate and Audit. Using a descriptive qualitative research method that focuses on phenomenology, based on the main data of observation, interviews and other document data as supporting secondary data.*

*The results of the study then show that the Government of Bukittinggi City for the 2022 Fiscal Year has met the service performance target at Minimum Service Standards at 97% with 3% of the deficiencies being mostly in the category of educators and education staff who are still not fully qualified. SLD-IV in each level of education. In addition, in 2022, from a budget perspective, there is a shortage as a result of the budget allocation for the implementation of PUPB. The researcher concludes that using this rationale makes it easier for the Government of Bukittinggi City and the Education and Culture Office of the City of Bukittinggi to carry out overall management from the initial stages of formulation to the end of performance evaluation in planning, organizing, actuating, controlling and evaluating audits so that budgeting for spending can be spent down to the last rupiah correctly. However, this thinking has not been able to explain further the differences in authority between levels of government to run program activities, or how the implementation of program budgeting allocations has different sources of funds, especially in the middle of the implementation of the fiscal year..*

***Keywords: Minimum Service Standards (SPM), Education, Bukittinggi City***